

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Prakata	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Singkatan	xiv
Daftar Istilah	xv
Intisari	xviii
<i>Abstract</i>	xix
Bab 1: Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Posisi Penelitian	10
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.5 Keaslian Penelitian	20
Bab 2: Kajian Teoritik	23
2.1 Perbatasan kota	24
2.1.1 Pengertian Perbatasan Kota	24
2.1.2 Interkasi dan Kolaborasi Antar Daerah di Perbatasan Kota	27
2.1.3 Sifat Mendua di Perbatasan Kota	28
2.2 Perencanaan Kolaboratif Antar Daerah	30
2.2.1 Kolaborasi dan Kontinum Kolaborasi	30
2.2.2 Teori Perencanaan Kolaboratif	32
2.2.3 Kewajiban Otonomi dan Sosial Daerah	35
2.2.4 Perwilayahan Perkotaan	36
2.2.5 Perencanaan Antar Daerah	37
2.2.6 Perencanaan Kolaboratif Antar Daerah	38
2.3 Konsep Teoritik Perencanaan Kolaboratif Antar Daerah di Perbatasan Kota	40
2.3.1 Ragam Kolaborasi Antar Daerah	40
2.3.2 Karakteristik Kolaborasi Antar Daerah	43
2.3.3 Penyebab Kolaborasi Antar daerah	45
2.4 Konsep Strategi Kolaborasi Antar Daerah	51
2.4.1 Proses Perencanaan Kolaboratif	52
2.4.2 Manajemen Kolaborasi antar daerah	53
2.4.3 Mediasi Kolaborasi antar daerah	54
2.5 Proposisi Penelitian	55
2.6 Kisi-kisi Penelitian	59
Bab 3: Metoda Penelitian	62
3.1 Jenis Penelitian	62
3.1.1 Kerangka Strategi Penelitian	62
3.1.2 Paradigma Penelitian	63
3.1.3 Pendekatan Penelitian	63
3.1.4 Strategi Penelitian	65
3.1.5 Fungsi Kasus	66



3.2 Obyek Penelitian Dan Kasus	67
3.3 Metoda Penelitian	71
3.3.1 Proses Penelitian	71
3.3.2 Metoda Pengumpulan Data	71
3.2.3 Metoda Kajian	86
3.2.5 Validasi Data	82
Bab 4: Gambaran Kasus Penelitian	83
4.1 Gambaran Kawasan Joglosemar	83
4.2 Gambaran Perencanaan Antar Daerah di Kawasan Joglosemar	85
4.3 Gambaran Kasus-Kasus	88
4.3.1 Gambaran Kasus 1: Pelayanan Penyediaan Air Bersih Lintas Batas Daerah PDAM Kota Surakarta di Perbatasan Kota Surakarta	88
4.3.2 Gambaran Kasus 2: Penyediaan Air Baku Lintas Batas Daerah Mata Air Senjoyo, di Perbatasan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang	94
4.3.3 Gambaran Kasus 3: Pelayanan Lintas Batas Daerah Pasar Harjodaksino di Perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo .	98
4.3.4 Gambaran Kasus 4: Pelayanan Pendidikan Sekolah-Sekolah Menengah Lintas Batas Daerah di Perbatasan Kota Semarang	104
4.3.5 Gambaran Kasus 5: Pelayanan Persampahan Lintas Batas Daerah di Perbatasan kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul	111
4.3.6 Gambaran Kasus 6: Pelayanan Persampahan Antar Daerah di Perumnas Pucang Gading di Perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak	118
4.3.7 Gambaran Kasus 7: Pengembangan Kawasan Perkotaan Antar Daerah di Kawasan Mertoyudan di Perbatasan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang	126
Bab 5: Hasil Penelitian dan Pembahasan	139
5.1 Kajian Kategorisasi	139
5.1.1 Kajian Pengkodean Terbuka	140
5.1.2 Kajian Pengkodean Berporos	144
5.1.3 Kajian Pengkodean Selektif	148
5.2 Kajian Kasus-kasus Otonomi-Kooperatif	148
5.2.1 Kajian Kasus Pelayanan Pendidikan Sekolah-Sekolah Menengah Lintas Batas Daerah di Perbatasan Kota Semarang	150
5.2.2 Kajian Kasus Pelayanan Persampahan Lintas Batas Daerah di Perbatasan Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Bantul	161
5.2.3 Kajian Lintas Kasus Otonomi-Kooperatif	170
5.3 Kajian Kasus-kasus Otonomi-Asertif	172
5.3.1 Kajian Kasus Pelayanan Penyediaan Air Bersih Lintas Batas Daerah PDAM Kota Surakarta di Perbatasan Kota Surakarta dan Daerah-Daerah Tetangga	172
5.3.2 Kajian Kasus Persampahan Antar Daerah di Perumnas Pucang Gading di Perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak	184
5.3.3 Kajian Lintas Kasus Otonomi-Asertif	192
5.4 Kajian Kasus-kasus Sosial-kooperatif	194
5.4.1 Kajian Kasus Penyediaan Air Baku Lintas Batas Daerah Mata Air Senjoyo, di Perbatasan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang	194
5.4.2 Kajian Kasus Pelayanan Lintas Batas Daerah Pasar Harjodaksino Di Perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	205



5.4.3 Kajian Lintas Kasus Sosial-kooperatif	215
5.5 Kajian Kasus-kasus Sosial-asertif	217
5.5.1 Kajian Kasus Pengembangan Kawasan Perkotaan Antar Daerah di Kawasan Mertoyudan di Perbatasan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang	217
5.5.2 Kajian Kasus Kategori Sosial-Asertif	222
5.6 Kajian Lintas Kategori	228
5.7 Pembahasan Temuan Penelitian	232
5.7.1 Pembahasan Temuan Ragam Kolaborasi Antar Daerah	232
5.7.2 Pembahasan Temuan Proses Kolaborasi Antar Daerah	239
5.7.3 Pembahasan Temuan Penyebab Kerja Sama dan Konflik Antar daerah	244
5.8 Pembahasan Pengkayaan Teori Perencanaan Kolaboratif	248
5.8.1 Teori Perencanaan Kolaboratif	248
5.8.2 Pengkayaan 1: Teori Perencanaan Kolaboratif Antar Daerah	250
5.8.3 Pengkayaan 2: Teori Perencanaan Kolaboratif Antar Daerah di Perbatasan Kota	252
5.8.4 Pengkayaan 3: Teori Perencanaan Kolaboratif Antar Daerah di Lingkungan Mendua	255
5.8.5 Pengkayaan 4: Strategi Kolaborasi Antar Daerah di Perbatasan Kota	259
5.9 Pembahasan Implikasi Terhadap Kebijakan	262
Bab VI: Penutup	271
6.1 Kesimpulan	271
6.2 Sumbangan Terhadap Pengetahuan	277
6.3 Implikasi Terhadap Kebijakan	282
6.4 Rekomendasi Penelitian Lanjutan	285
Daftar Pustaka	289
Lampiran	280
Tabel-tabel perumusan hasil temuan lapangan	297
Lampiran daftar kode nara sumber	325

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kebutuhan konsep dan teori sebagai rujukan penelitian	24
Tabel 2.	Kisi-kisi dan pertanyaan penelitian	60
Tabel 3.	Rumusan gambaran kasus pelayanan penyediaan air bersih lintas batas daerah PDAM Kota Surakarta di Perbatasan Kota Surakarta	93
Tabel 4.	Pemanfaat Mata Air Senjoyo	95
Tabel 5.	Rumusan gambaran kasus penyediaan air baku lintas batas daerah Mata Air Senjoyo, di perbatasan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang	98
Tabel 6.	Rumusan gambaran pelayanan lintas batas daerah Pasar Harjodaksino di perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	103
Tabel 7.	Rumusan gambaran kasus pelayanan pendidikan menengah lintas batas daerah di perbatasan Kota Semarang	110
Tabel 8.	Rumusan gambaran kasus pelayanan persampahan lintas batas daerah di perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul	117
Tabel 9.	Rumusan gambaran kasus pelayanan persampahan antar daerah di Perumnas Pucang Gading di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak	126
Tabel 10.	Rumusan gambaran kasus pengembangan kawasan perkotaan di Kawasan Mertoyudan di perbatasan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang	138
Tabel 11.	Kajian pengkodean terbuka	143
Tabel 12.	Kajian pengkodean berporos	146
Tabel 13.	Matriks kombinasi kategori cara pandang daerah terhadap kolaborasi antar daerah dan cara bersikap daerah terhadap daerah tetangga	148
Tabel 14.	Kajian tematik kasus pelayanan pendidikan sekolah-sekolah menengah lintas batas daerah di perbatasan Kota Semarang dan daerah-daerah tetangga	160
Tabel 15.	Rumusan kajian kasus pelayanan pendidikan sekolah-sekolah menengah lintas batas daerah di perbatasan Kota Semarang dan daerah-daerah tetangga	161
Tabel 16.	Kajian tematik kasus pelayanan persampahan di perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul	168
Tabel 17.	Rumusan kajian kasus pelayanan persampahan di perbatasan kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul	170
Tabel 18.	Kajian lintas kasus kategori otonomi-kooperatif	171
Tabel 19.	Kajian tematik kasus pelayanan penyediaan air bersih lintas batas daerah PDAM Kota Surakarta di perbatasan Kota Surakarta	181
Tabel 20.	Rumusan kajian kasus pelayanan penyediaan air bersih lintas batas daerah PDAM Kota Surakarta di perbatasan Kota Surakarta	190
Tabel 21.	Kajian tematik kasus pelayanan persampahan lintas batas daerah di Perumnas Pucang Gading di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak	189
Tabel 22.	Perumusan kajian kasus pelayanan persampahan lintas batas daerah di Perumnas Pucang Gading di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak	193
Tabel 23.	Kajian lintas kasus kategori otonomi-asertif	194



Tabel 24.	Kajian tematik kasus penyediaan air baku lintas batas daerah Mata Air Senjoyo di perbatasan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang	203
Tabel 25.	Rumusan kajian penyediaan air baku lintas batas daerah Mata Air Senjoyo di perbatasan Kota Salatiga	203
Tabel 26.	Kajian tematik kasus pelayanan lintas batas daerah Pasar Harjodaksino di perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	212
Tabel 27.	Rumusan kajian kasus pelayanan lintas batas daerah Pasar Harjodaksino di perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	215
Tabel 28.	Kajian lintas kasus kategori sosial-kooperatif	216
Tabel 29.	Kajian tematik kasus pengembangan kawasan perkotaan lintas batas daerah di Kawasan Mertoyudan di perbatasan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang	220
Tabel 30.	Rumusan kajian pengembangan kawasan perkotaan lintas batas daerah di Kawasan Mertoyudan di perbatasan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang	221
Tabel 31.	Rumusan kajian kasus kategori sosial-asertif	229
Tabel 32.	Kajian lintas kasus-kasus	231
Tabel 33.	Kajian lintas kategori	232
Tabel 34.	Ragam karakteristik perencanaan kolaboratif antar daerah di perbatasan kota yang efisien dan efektif	266
Tabel 35.	Perbandingan kriteria kolaborasi antar daerah pelayanan persampahan lintas batas daerah di kawasan perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, dan pelayanan pendidikan sekolah-sekolah menengah lintas batas daerah di kawasan perbatasan Kota Semarang dan daerah tetangga	268

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Posisi penelitian	18
Gambar 2.	Anatomi struktur kawasan perbatasan daerah	26
Gambar 3.	Kedudukan bagian-bagian kawasan perkotaan dan garis batas kota	27
Gambar 4.	Model kontinum kolaborasi Selden dkk.	31
Gambar 5.	Model kontinum kolaborasi Frey dkk.	32
Gambar 6.	Teori perencanaan kolaboratif	34
Gambar 7.	Teori perencanaan kolaboratif antar daerah	40
Gambar 8.	Proposisi perencanaan kolaboratif antar daerah di perbatasan kota	58
Gambar 9.	Proposisi kategorisasi strategi kolaborasi antar daerah di perb. kota	59
Gambar 10.	Kerangka strategi penelitian	62
Gambar 11.	Peta lokasi kasus-kasus penelitian di kota-kota Joglosemar	71
Gambar 12.	Proses penelitian	75
Gambar 13.	Contoh wawancara dengan nara sumber	77
Gambar 14.	Contoh pengamatan lapangan	78
Gambar 15.	Contoh dokumen	79
Gambar 16.	Peta Kawasan Joglosemar di Wilayah Provinsi Jateng dan DIY	83
Gambar 17.	Peta lokasi pelayanan air bersih lintas batas daerah PDAM Kota Surakarta di Perbatasan Kota Surakarta	88
Gambar 18.	Peta lokasi Mata Air Senjoyo di perbatasan Kota Salatiga	94
Gambar 19.	Peta lokasi Pasar Harjodaksino di perbatasan Kota Surakarta	99
Gambar 20.	Peta lokasi pelayanan pendidikan lintas batas daerah di perbatasan Kota Semarang	105
Gambar 21.	Peta lokasi pelayanan persampahan lintas batas daerah di perbatasan kota Yogyakarta	113
Gambar 22.	Struktur organisasi Sekber Kartamantul	114
Gambar 23.	Peta lokasi pelayanan persampahan lintas batas daerah di perbatasan Kota Semarang	119
Gambar 24.	Kawasan Mertoyudan di Perbatasan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang yang diperselisihkan	127
Gambar 26.	Matriks kombinasi kategori cara pandang daerah terhadap kolaborasi antar daerah dan cara bersikap daerah terhadap daerah tetangga	148
Gambar 27.	Model 1: Teori perencanaan kolaboratif	250
Gambar 28.	Model 2: Teori Perencanaan kolaboratif antar daerah	251
Gambar 29.	Model 3: Teori perencanaan kolaboratif antar daerah di lingkungan berpotensi kerja sama	253
Gambar 30.	Model 4: Teori perencanaan kolaboratif antar daerah di lingkungan rawan konflik	254
Gambar 31.	Model 5: Teori perencanaan kolaboratif antar daerah di lingkungan mendua	262
Gambar 32.	Model strategi kolaborasi antar daerah di perbatasan kota	244
Gambar 33.	Teori perencanaan kolaboratif	279
Gambar 34.	Pengkayaan teori perencanaan kolaboratif berdasarkan hasil penelitian	281
Gambar 35.	Pengkayaan strategi kolaborasi perencanaan kolaboratif antar daerah berdasarkan hasil penelitian	282

DAFTAR SINGKATAN

BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
BKAD	: Badan Kerja Sama Antar Daerah
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Jateng	: Jawa Tengah
Kartamantul	: Yogyakarta, Sleman, Bantul
Kedungsepur	: Kendal, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Sekber	: Sekretariat Bersama
Subosukawonosraten	: Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Sragen, Klaten
TKKSD	: Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
UU	: Undang-undang

DAFTAR ISTILAH

Akomodasi	: Solusi kolaboratif yang mengakomodasikan salah satu kepentingan pihak yang terlibat, dan pihak lain mengikutinya
Asertif	: Sikap yang menunjukkan kepercayaan diri untuk mengarahkan dan menguasai pihak lain di dalam suatu interaksi
Integrasi	: Kolaborasi antar berbagai pihak untuk menterpadukan informasi, kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama
Interaksi	: Tindakan saling mempengaruhi antara dua atau lebih pihak
Interaksi antar daerah	: Tindakan saling mempengaruhi antara dua atau lebih daerah
Jejaring	: Kolaborasi antar berbagai pihak untuk berbagi informasi secara menguntungkan bersama
Kerja sama	: Kegiatan bersama antar pihak atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama
Kewajiban otonomi daerah	: Kewajiban daerah menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kewajiban sosial daerah	: Kewajiban daerah memenuhi kepentingan dan kebutuhan sosial masyarakat
Kolaborasi	: Interaksi konstruktif yang mempertemukan berbagai pihak untuk mengembangkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi
Kolaborasi antar daerah	: Interaksi konstruktif yang mempertemukan beberapa daerah untuk mengembangkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi
Kolaborasi otonomi-asertif	: Kolaborasi yang dilakukan berlandaskan cara pandang daerah terhadap interaksi antar daerah sebagai bagian dari kewajiban otonomi daerah, dan cara bersikap daerah yang asertif terhadap daerah tetangga
Kolaborasi otonomi-kooperatif	: Kolaborasi yang dilakukan berlandaskan cara pandang daerah terhadap interaksi antar daerah sebagai bagian dari kewajiban otonomi daerah, dan cara bersikap daerah yang kooperatif terhadap daerah tetangga
Kolaborasi sosial-asertif	: Kolaborasi yang dilakukan berlandaskan cara pandang daerah terhadap interaksi antar daerah sebagai bagian dari kewajiban sosial daerah, dan cara bersikap daerah yang asertif terhadap daerah tetangga
Kolaborasi sosial-kooperatif	: Kolaborasi yang dilakukan berlandaskan cara pandang daerah terhadap interaksi antar daerah sebagai bagian dari kewajiban sosial daerah, dan cara bersikap daerah yang kooperatif terhadap daerah tetangga
Kolaboratif	: Sifat yang menunjukkan adanya interaksi yang mempertemukan berbagai pihak untuk mengembangkan solusi atas permasalahan yang dihadapi mereka
Konflik	: Keadaan di dalam suatu interaksi yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah atau akan segera memengaruhi secara negatif pihak lain



Kontinum kolaborasi	: Serangkaian ragam kolaborasi yang disusun dari yang bersifat kolaboratif terkuat hingga yang terlemah
Kooperasi	: Kolaborasi antar berbagai pihak untuk berbagi informasi, kegiatan dan sumber daya di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama
Kooperatif	: Sikap yang menunjukkan keinginan bekerja sama dan memenuhi keinginan bersama dengan pihak lain di dalam suatu interaksi
Koordinasi	: Kolaborasi antar berbagai pihak untuk berbagi informasi dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama
Manajemen akomodasi	: Manajemen yang mengakomodasikan keinginan daerah tetangga untuk bersama-sama memanfaatkan perbatasan kota
Manajemen kolaborasi	: Manajemen yang membangun solusi bersama kota dan daerah tetangga untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan kota
Manajemen kompetisi	: Manajemen yang memanfaatkan potensi kawasan perbatasan untuk kepentingan daerahnya sendiri.
Manajemen kompromi	: Manajemen yang mengedepankan kompromi antara kota dan daerah tetangganya di perbatasan kota
Manajemen pembiaran	: Manajemen yang memandang keberadaan kawasan perbatasan tidak penting, sehingga dibiarkan
Otonomi daerah	: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Perencanaan birokrasi	: Perencanaan yang berorientasi pada peraturan administrasi dan birokrasi otonomi daerah
Perencanaan intermediasi	: Perencanaan yang berorientasi pada mediasi dalam interaksi antar pihak
Perencanaan kajian kebijakan	: Perencanaan yang berorientasi pada penggunaan analisis kebijakan di dalam pengambilan keputusan
Perencanaan kolaboratif	: Perencanaan yang berupaya mengakomodasikan dan mempertemukan perbedaan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan solusi atas permasalahan bersama
Perencanaan manajerial	: Perencanaan yang berorientasi pada pengelolaan kepentingan daerah sendiri
Perencanaan reformasi sosial	: Perencanaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Solusi kolaboratif	: Solusi yang dihasilkan dari proses perencanaan kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan bersama pihak-pihak yang terlibat
Solusi kompetisi	: Solusi kolaboratif yang mengedepankan hanya salah satu kepentingan pihak yang terlibat dan mengabaikan pihak lain
Solusi kompromi	: Solusi kolaboratif yang mengakomodasikan sebagian kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat
Solusi konsensus	: Solusi kolaboratif yang mengakomodasi semua kepentingan pihak yang terlibat



Solusi
pengabaian : Solusi kolaboratif yang tidak mengakomodasikan kepentingan pihak-
pihak yang terlibat

Strategi
kolaborasi : Arahkan untuk melakukan kolaborasi